

INFO JUDICIAL REVIEW

Putusan Sela Mahkamah Konstitusi

Pada Tanggal 11 Oktober 2022



"We Believe Accurate Research Can Support Parliament's Scrutiny Function"

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SUSUNAN TIM INFO JUDICIAL REVIEW PUSPANLAK UU | BADAN KEAHLIAN DPR RI

PENGARAH

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)

PENANGGUNGJAWAB

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.
(Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang)

Tim Penyusun Info Judicial Review Puspanlak UU

1 PUTUSAN SELA

MENGABULKAN PERMOHONAN PROVISI PARA PEMOHON

**Untuk menunda keberlakuan Pasal 40A
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia**





PUTUSAN SELA NO. 70/PUU-XX/2022

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

- 1.H. Irnesif, S.H., M.M.
- 2.Dr. Zulhadi Savitri Noor, S.H., M.H.
- 3.Wilmar Ambarita, S.H., M.H., M.Si.
- 4.Dra. Renny Ariyanny, S.H., M.H., LL.M.
- 5.Dra. Indrayati Siagian, S.H., M.H.
- 6.Fahriani Suyuthi, S.H., M.H.

yang berprofesi sebagai Jaksa PNS pada Kejaksaan RI

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 40A UU 11/2021:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.”

Batu Uji:

Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Amar Putusan

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir:

- 1.Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon;
- 2.Menyatakan menunda berlakunya Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) berlaku sejak putusan ini diucapkan.



PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

**"WE BELIEVE ACCURATE RESEARCH CAN SUPPORT
PARLIAMENT'S SCRUTINY FUNCTION"**

 Jl. Gatot Subroto, Senayan, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 10270.

Find us on: <https://puspanlakuu.dpr.go.id>